

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS & World Bank. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dhanie Nugroho, Priadi Asmanto, dan Adji. 2020. *Leading indicators Kemiskinan di Indonesia: Penerapan pada outlook jangka pendek*. Tim Nasional Percetakan.
- Fariied, Ali. 2015 *Demokratisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Qardhawi, Yusuf, DR. 2013. *Ijtihad Fi Syariat Al-Islamiyyah* (ter. A. Syathori), Jakarta: Bulan Bintang.
- Rutiana Dwi Wahyunengseh, Sri Hastjarjo, Sudarno, dan Didik Gunawan Suharto. 2017. *Penetrasi Internet dan Angka Kemiskinan*. Jawa Tengah. Lakheisa.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*
- Wally, Y. (2013). *Percepatan Pembangunan dan Kemandirian Kampung Memahami "Gagasan Gila" Bantuan 1 Miliar Rupiah Tiap Tahun Untuk Kampung GAYA YW*. Yogyakarta: BPFE

Skripsi dan Jurnal

Kusumasari, Dwiputrianti & Allo. 2015. *“AKUNTABILITAS” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Gayup Suryani-2020-*Faktor-faktor penghambat Transformasi Digital dan Perkembangan-Posltekas* Denpasar.

Rezki Nur Alam-2022 *Peran Kepemimpinan perempuan dalam mengembangkan Ma Nurul Ilmi Desa Meranti Kecamatan Taliabu Barat-IAIN KENDARI*

Rendi A. Diningrat. 2019. *Mengapa Anak dari Keluarga Miskin Cenderung akan Tetap Miskin Ketika Dewasa: Penjelasan Temuan Riset SMERU*. SMERU Research Institute

Yessy Marga Safitri-2022. *Stunting dan Warisan Kemiskinan: Perlunya Edukasi dan Intervensi*. Birokrasi Melayani.

Undang-undang:

Peraturan Bupati Kabupaten Sidrap Nomor 60 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Internet

<https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MISKIN-MENURUT-STANDAR-BPS>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara Penelitian Staf/Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sldrap

Tema Wawancara: Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan

Narasumber/ Informan	Jabatan	Hasil Wawancara
Hj. Nurhidayah Khaimal, S.Km., M.Kes.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sldrap	“...Permasalahan kemiskinan juga melanda di Kabupaten Sldrap ini, tentunya peranan dari pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat. Dinas Sosial adalah instansi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan sosial ini secara khusus. Tentunya kita berharap bahwasanya Dinas Sosial mampu membantu masyarakat untuk menghadapi kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kan cita-cita negara juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bukan. Salah satu peran dari dinas sosial dalam hal ini adalah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat baik berupa bimbingan maupun penyuluhan untuk meningkatkan kesejahterannya...”
Nurmila R., S.E.	Staf Bidang Analisis Rehabilitasi Sosial	“...kemiskinan merupakan permasalahan yang besar serta umum yang terjadi Indonesia, bahkan di Kabupaten Sldrap ini juga menghadapi permasalahan kemiskinan ini. Kami dari jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sldrap sangat berupaya untuk mengatasi permasalahan ini, terlebih sudah tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada kami. Mungkin peranan yang hanya dilihat oleh masyarakat dari dinas sosial ini adalah memberikan bantuan baik pangan maupun non pangan seperti PKH, BPNT, dan lain

		<p>sebagainya bagi masyarakat yang kurang mampu, padahal berbagai kebijakan telah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah yang diwenangkan juga kepada dinas sosial ini. Adapun peran inti sebenarnya adalah memberikan penyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat. Kita berharap untuk kedepannya, dinas sosial Kabupaten Sldrap bisa untuk hadir dan membantu masyarakat mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Terlebih visi dan misi Kabupaten Sldrap juga mengacu kepada hal demikian...”</p>
<p>Muh. Fadli Saad Sikir, S.Pd. M.M.</p>	<p>Staf/Pegawai Dinas Sosial</p>	<p>“...Harapan kita dari dinas sosial dan masyarakat adalah setiap tahun itu ada penurunan tingkat kemiskinan, minimal tentunya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat ini tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh dinas sosial saja, tentunya kita banyak membutuhkan kerjasama baik antar lembaga pemerintahan, LSM, utamanya dari kalangan masyarakat itu sendiri...”</p>
<p>Hj. Sutriani Ta'imeng, S.Sos.</p>	<p>Staf/Pegawai Dinas Sosial</p>	<p>“...dalam rangka melakukan pendampingan desa, saya pribadi banyak mendengar keluhan masyarakat seputar kasus perkonomian seperti pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu, memiliki harapan agar dapat selalu dibantu oleh pemerintah. Masalah ini adalah bagian dari permasalahan sosial, bakti sosial tidak diragukan lagi merupakan salah satu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini. Sejauh ini, peran dari Dinas Sosial sudah sangat baik seperti melakukan penyuluhan dan pembagian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu...”</p>

Tema Wawancara: Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan

Narasumber/ Informan	Jabatan	Hasil Wawancara
Hj. Nurhidayah Khaimal, S.Km., M.Kes.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sldrap	<p>“...Kemiskinan di Kabupaten Sldrap itu memang setiap tahun terjadi penurunan. Cuma pada saat covid, kita agak naik lagi tingkat kemiskinan. Kabupaten Sldrap menempati urutan ketiga di antara kabupaten dan kota Aceh. Saya pikir kalau masalah tingkat kemiskinan naik turun itu sangat berpengaruh dengan perekonomian masyarakat. Kalau memang ekonomi masyarakat itu lancar, saya pikir setiap tahun Kabupaten Sldrap itu selalu mengalami penurunan angka kemiskinan, walaupun jumlahnya 0. Pengurangan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja; itu juga membutuhkan kerjasama dengan lembaga atau lembaga lain. Tugas Dinas Sosial dalam situasi ini adalah mengumpulkan informasi tentang orang-orang dari kelas sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan, dan menengah. Data itu nanti kita bawa bersama dinas lain, disitulah kita akan rumuskan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan wewenang daripada dinas masingmasing. Hingga saat ini, salah satu upaya yang kami lakukan dalam meminimalisir kemiskinan di Kabupaten Sldrap adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu...”</p>
Muh. Fadli Saad Sikir, S.Pd. M.M.	Staf/Pegawai Dinas Sosial	<p>“...dalam rangka mengentaskan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan. Akan tetapi, yang teratur itu kita lihat dari pemberdayaan. Artinya apa yang dilakukan dalam hal pengentasan kemiskinan kita bimbing dari awal sampai</p>

		pada masanya seseorang itu keluar daripada status kemiskinan. Dinas Sosial dalam hal ini memiliki fungsi dan peran sebagai fasilitator pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu. Tentunya, dengan dilakukan pemberdayaan ini masyarakat akan semakin berkembang serta dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya...”
Hj. Sutriani Ta'imeng, S.Sos.	Staf/Pegawai Dinas Sosial	“...Setiap inisiatif dan kebijakan pemerintah serta pemberdayaan yang diberikan oleh dinas-dinas sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan pasti berdampak pada masyarakat. Tentunya pemberdayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, dengan adanya pemberdayaan tentu dalam tahap selanjutnya masyarakat juga bisa secara mandiri untuk meningkatkan ekonominya...”

Tema Wawancara: Memberikan Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan

Narasumber/ Informan	Jabatan	Hasil Wawancara
Hj. Nurhidayah Khaimal, S.Km., M.Kes.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sldrap	“...Salah satu langkah atau upaya yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah menyalurkan bantuan sosial atau bansos, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Kontribusi dari Dinas Sosial sendiri adalah menjadi lembaga atau pihak yang menyalurkan bantuan sosial tersebut secara langsung kepada masyarakat, dimana bantuan sosial yang diluncurkan itu tidak sedikit, contoh misalnya seperti bantuan program sembako yang diluncurkan oleh kementerian sosial, itu

		kan hampir setiap bulan atau dua bulan sekali mereka terima. Belum lagi PKH, kan sangat membantu pengeluaran masyarakat dan juga mempermudah proses pengentasan kemiskinan...”
Muh. Fadli Saad Sikir, S.Pd. M.M.	Staf/Pegawai Dinas Sosial	“...Masyarakat, terutama yang kurang mampu, sangat menjunjung tinggi bantuan sosial sebagai kebijakan dan contoh nyata upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, seperti di Kabupaten Sldrap. Dinas Sosial dibawah Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk mendata serta menyalurkan bantuan ini, ada beberapa kriteria dalam menetapkan penerima bantuan. Kalau dulu berdasarkan, desil ada desil 1, desil 2, 3,4. Desil itu ditentukan dari poin-poin melalui semua aset yang mereka miliki. Misalnya punya mobil, rumah semuanya mempunyai poin masing-masing. Tergantung pada faktor ini, seseorang akan jatuh ke dalam kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan terhadap kemiskinan, atau kelas menengah. Kriterianya sekarang tinggal 9, apakah seseorang itu memiliki tempat tinggal, apakah kepala rumah tangga bekerja, secara lengkap kriteria ini dapat dilihat dalam Permensos 262/2022...”

Tema Wawancara: Faktor Penghambat Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan

Narasumber/ Informan	Jabatan	Hasil Wawancara
Hj. Nurhidayah Khaimal, S.Km., M.Kes.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sldrap	“...Pada tahun 2023 kami mencoba membuat aplikasi yang hampir persis seperti sistem informasi kesejahteraan sosial yang ada di kemensos, basis datanya sama tetapi pada saat

		<p>pengimputan nanti kita akan cek ulang. Nanti setiap data yang akan dimasukkan harus betul-betul real sesuai dengan kenyataan. Mungkin ini masih memerlukan pengembangan juga, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang bisa diperbaiki, jadi pada saat launching bisa diakses semua orang. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sebelumnya yang ditemui, yang mana terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sldrap. Kendalanya memang di masalah data kemiskinan. Dimana memang data kemiskinan itu belum sempurna, mengingat data yang kita pergunakan itu masih data daripada sistem informasi kesejahteraan sosial. Memang setiap bulan kita mengupdate, tetapi yang mengupdatenya kan bukan satu orang. Jadi kan setiap desa itu kita ada petugas registrasi kelurahan/desa. Setiap desa itu ada 2 orang, apakah disaat mereka mengupdate data itu memang-memang sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Kan itu masalahnya sekarang...”</p>
<p>Muh. Fadli Saad Sikir, S.Pd. M.M.</p>	<p>Staf/Pegawai Dinas Sosial</p>	<p>“...Kalau masalah yang timbul tidak ada dalam mengentaskan kemiskinan ini, yang ada ialah paling orang minta bantuan semua. Kenapa saya tidak dapat, kenapa ini dapat. Salah satunya kenapa ada yang tidak dapat, karena dikemensos itu kan sudah ada kuota. Memang ada yang layak belum dapat tetapi banyak permasalahan, contoh mereka dulu sudah dapat tetapi disaat di online kan data, antara di ktp dan buku rekening berbeda nama atau antara nik di ktp dan kk beda. Cuma kadang-kadang yang sering terjadi, kementerian sosial itu saat memberikan bantuan datanya tidak dipertanyakan, ada yang sudah kita usulkan layak tetapi kadang-</p>

		<p>kadang yang sudah meninggal keluar namanya lagi padahal kita sudah hapus. Nah itu yang menjadi pertanyaan krusial. Padahal apabila kita menyadari dan memahami, keterbatasan anggaran adalah hambatan utama dalam mengentaskan kemiskinan seperti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat...”</p>
Nurmila R., S.E.	Staf Bidang Analisis Rehabilitasi Sosial	<p>“...permasalahan pengentasan kemiskinan ini bukan sebuah hal yang mudah untuk di atas oleh kita, tentunya banyak hambatan serta tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan. Saya rasa, Dinas Sosial juga memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi masalah sosial. Terlebih pola pikir masyarakat yang masih kebanyakan belum berubah atau jalan ditempat, yang hanya mengharapkan bantuan seperti PKH ini...”</p>
Muh. Fadli Saad Sikir, S.Pd. M.M.	Staf/Pegawai Dinas Sosial	<p>“...data penduduk merupakan acuan utama dari kami dalam menjalankan tugas serta fungsi dari dinas sosial, kita baru mengetahui kondisi masyarakat berdasarkan data yang ada. Dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu (fakir miskin) datanya masih belum akurat, hal ini terlihat saat memberikan bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Banyak yang dikategorikan tidak layak tetapi menjadi penerima bantuan, dan begitu juga sebaliknya masyarakat yang dikategorikan layak tetapi tidak terdata dan tidak terpilih sebagai penerima bantuan sosial yang sudah dialokasikan oleh pemerintah...”</p>
Nurmila R., S.E.	Staf Bidang Analisis Rehabilitasi Sosial	<p>“...pendataan penduduk perlu dioptimalkan lagi oleh petugas registrasi kelurahan/desa, masih banyak ketidaksesuaian data dengan realita yang ada. Bahkan seperti angka kemiskinan dan penerima bantuan, saya rasa masih harus</p>

		dievaluasi kembali. Sangat disayangkan apabila data itu tidak sesuai, kan acuan dari pemerintah untuk menjalankan kebijakannya adalah bergantung kepada data kependudukan...”
Muh. Fadli Saad Sikir, S.Pd. M.M.	Staf/Pegawai Dinas Sosial	“... selain perihal pendataan yang belum maksimal, hambatan lainnya yang juga dirasakan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Apalagi mengingat pola pikir mereka yang tetap percaya bahwa dukungan hanya datang dalam bentuk uang atau barang berwujud lainnya, karena sebanyak apapun kita kasih bantuan kalau pola pikirnya masih suka meminta-minta sampai kapanpun tidak berubah. Hambatan ini, berasal dari pemerintahan Kabupaten Sldrap dan Dinas Sosial sendiri, serta tidak mungkin ketersediaan anggaran seluruhnya dialokasikan untuk bantuan. Masih banyak hal yang lain yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah, maka salah satu tantangan yang dihadapi dinas sosial di Kabupaten Sldrap adalah keterbatasan anggaran. ...”

Lampiran 2

Hasil Wawancara Penelitian Warga Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Sldrap

Tema Wawancara: Tanggapan warga terkait bantuan sosial

Narasumber/ Informan	Warga Desa?kelurahan di Kecamatan Maritengngae	Hasil Wawancara
Mustakim	Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae	“...Penyediaan dukungan pemerintah sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan ini seakan menjadi berkah yang memudahkan kami dalam rangka melanjutkan hidup. Tentunya kami berharap, pemerintah khususnya dinas sosial mampu untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi permasalahan kemiskinan...”
Sumarti M.	Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae	“...Dukungan yang kami terima dari pemerintah sangat bermanfaat bagi kami, dan tentunya akan mengurangi beban mereka yang kurang beruntung. Saya sendiri adalah penerima bansos PKH (Rp. 225.000 /3 bulan) dan BPNT (Rp. 200.000 perbulan). Semoga bantuan seperti ini dapat diselalu disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu...”
Megawati	Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae	“...kami terima bantuan pemerintah yang bisa membantu mengurangi beban kami. Saya sendiri menerima bansos PKH (Rp. 225.000 /3 bulan) dan BPNT (Rp. 200.000 perbulan). Semoga bantuan seperti ini dapat diselalu disalurkan oleh pemerintah kepada kami...”

Yusmayanti	Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae	“...masyarakat seperti kami, sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Program bantuan sosial pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan bagi kehidupan kita, bantuan yang disalurkan oleh dinas sosial seakan menjadi perantara kami menuju hidup yang lebih baik. Saya adalah salah satu penerima bantuan sosial PKH (Rp. 600.000/3bulan) BNPT (Rp. 200.000 perbulan), saya pribadi berharap bantuan yang seperti selalu dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan...”
M. Hasbi	Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae	“...bantuan sosial merupakan harapan dari masyarakat kurang mampu kepada pemerintah, kalau bukan pemerintah yang membantu masyarakatnya ya siapa lagi. Saya sangat bersyukur dibantu oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kami, bantuan ini akan memudahkan saya untuk memenuhi kebutuhan. Saya sendiri adalah penerima bantuan sosial PKH (Rp. 1.100.000 /3 bulan) dan BPBT (Rp. 200.000 perbulan)...”
Mawmunah	Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae	“...Kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Program bantuan sosial pemerintah membantu kehidupan kita, bantuan yang disalurkan oleh dinas sosial seakan menjadi penolong keluarga kami. Saya adalah salah satu penerima bantuan sosial PKH (Rp. 600.000/3bulan) BNPT (Rp. 200.000 perbulan), saya pribadi berharap bantuan yang seperti selalu dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan...”
Abdullah	Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae	“...Saya menerima bansos PKH (Rp. 225.000 /3 bulan) dan BPNT (Rp. 200.000 perbulan). Semoga bantuan

		seperti ini dapat diselalu disalurkan kepada kami yang miskin...”
Nurhayati	Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae	“...bantuan pemerintah yang bisa mengurangi beban kami. Saya menerima bansos PKH (Rp. 225.000 /3 bulan) dan BPNT (Rp. 200.000 perbulan). Semoga bantuan seperti ini dapat terus dilaksanakan pemerintah...”
Rahmaniah	Desa Allakkuang, Kecamatan Maritengngae	“...masyarakat seperti kami, sangat mengharapkan bantuan. Program bantuan sosial yang disalurkan oleh dinas sosial dapat membantu hidup yang lebih baik. Saya adalah salah satu penerima bantuan sosial PKH (Rp. 600.000/3bulan) BNPT (Rp. 200.000 perbulan), saya pribadi berharap bantuan seperti ini selalu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan...”
Sultan	Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae	“...Saya sangat bersyukur dibantu oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kami, bantuan ini akan memudahkan saya untuk memenuhi kebutuhan. Saya sendiri adalah penerima bantuan sosial PKH (Rp. 1.100.000 /3 bulan) dan BPBT (Rp. 200.000 perbulan)...”
Samsinar	Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae	“...Kami mengharapkan bantuan pemerintah. Program bantuan sosial pemerintah membantu dan menjadi penolong bagi kami. Saya menerima bantuan sosial PKH (Rp. 600.000/3bulan) BNPT (Rp. 200.000 perbulan), Saya harapkan bantuan sosial selalu dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan...”

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian







